

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G / 423 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/55/B.X/HK/2009 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA DAERAH (P2BD) DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA UNIT (P2BU) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dibentuk Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/55/B.X/HK/2009;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan pada lampiran Keputusan Gubernur Nomor G/55/B.X/HK/2009, maka untuk tertibnya administrasi dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota:
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Merubah Lampiran I dan II Keputusan Gubernur Lampung

Nomor : G/55/B.X/HK/2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan perubahan susunan personalia

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman

kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/55/B.X/HK/2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang

Unit (P2BU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan

Gubernur Lampung Nomor G/55/B.X/HK/2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pemerintah

Provinsi Lampung Tahun 2009 tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung Pada tanggal 15 Juni 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Para Kepala Dinas/Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung;
- 5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.,

LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/423/B.X/HK/2009

TANGGAL: 15 Juni 2009

SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA DAERAH (P2BD) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN	KET
		DALAM TIM	
I	2	3	5
1.	Kepala Bagian Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan	Ketua / Anggota	
	dan Penghapusan Aset Daerah pada Biro Perlengkapan		
	dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.		
2.	Kepala Bagian Penyimpanan Distribusi Penata Usahaan	Sekretaris /	
	Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah pada	Anggota	
	Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi		
	Lampung.		
3.	Kepala Sub. Bagian Penyimpanan dan Distribusi pada Biro	Anggota	
	Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung		
4.	Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai	Anggota	
	pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung		
5.	Kepala Sub. Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah	Anggota	
	Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung		
6.	Unsur Tenaga Teknis pada Unit Satuan Kerja Teknis		
	Provinsi Lampung	Tetap	
7.	Unsur Pengurus Barang pada Unit SKPD yang	Anggota Tidak	
	bersangkutan.	Tetap	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN 5 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/423/B.X/HK/2009

TANGGAL: 15 Juni 2009

SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA UNIT (P2BU) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

No.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
I	2	3	
1.	Kepala Sub Bagian Pemanfaatan dan Pengamanan pada	Ketua / Anggota	
	Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung		
2.	Kepala Sub Bagian Penata Usahaan Aset Daerah pada Biro	Sekretaris /	
	Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	
3.	Kasubag. Evaluasi dan Penganggaran Barang Daerah pada	Anggota	
	Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung		
3.	Kasubag. Pengawasan Pembinaan dan Pengendalian pada	Anggota	
	Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.		
5.	RTNTA INDRASARI, SE	Anggota	
	(NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda		
	Provinsi Lampung)		
6.	Unsur Tenaga Teknis pada Unit Satuan Kerja Teknis Provinsi	Anggota Tidak	
	Lampung.	Tetap	
7	Unsur Pengurus Barang pada Unit SKPD yang bersangkutan.	Anggota Tidak	
		Tetap	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.